PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013

(Survei pada UMKM di Kota Bandung)

Oleh:
Mentari Shulur
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: mentarishulur@gmail.com

ABSTRACT

Financial Statements are needed by businesses one of which UMKM as a basis for decision making, a reference in making financial statements of UMKM, namely the Accounting Standard Non Publicly Accountable Entities Without Public Accountability, still weak management of financial statements of UMKM make businesses hampered in developing their business and make it difficult to calculate thirsty taxes they pay. Regulation No. 46/2013 concerning the withholding tax of 1% of UMKM are very burdensome. This study aims to assess and analyze the effect of the application of SAK ETAP to the quality of financial statements of UMKM and to assess and analyze the influence of the quality of financial statements of UMKM on the application of Regulation No. 46 of 2013. The research method used is descriptive analysis and verification. The method of analysis using analytical methods to test the hypothesis is structural equation model analysis technique, commonly known as SEM (Structural Equation Modeling).

The results of this study indicate that the application of SAK ETAP positive effect on the quality of financial statements of UMKM and the quality of financial statements of UMKM positive effect on the application of Regulation No. 46 of 2013.

Keywords:Accounting Standard Non Publicly Accountable Entities Without Public Accountability, Influencing UMKM Financial Statements , Regulation No. 46/2013

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Menurut Sofjan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (2015) peraturan ini akan lebih menguntungkan pemerintah karena UKM masuk ke dalam sistem perpajakan, tetapi masih banyaknya UMKM yang tidak membayar pajak penghasilan sesuai denga PP No 46 Tahun 2013.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting* Information mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

SAK ETAP akan membantu UKM dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar berbasis IFRS yang akan diadopsi dalam Standar Akuntansi PSAK. (M. Jusuf Wibisana, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), /2013) Karena itu UKM harus mempunyai catatan untuk usahanya karena pencatatan tersebut dapat digunakan pemilik untuk menilai perkembangan usahanya. Untuk menilai kinerja keuangan usaha yang dijalankan maka pemilik dapat melihatnya di laporan keuanganperusahaan, selain itu laporan keuangan dapat digunakan untuk menyusun strategi usaha kedepannya.(Erik Dwi Pambudi,2012).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik belum dilakukan oleh semua pelaku UMKM.
2. Laporan keuangan UMKM belum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. Penerapan PP No.46 tahun 2013 memberatkan bagi sebagian pelaku UMKM.

1.3 Rumusan Maslah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM terhadap penerapan PP no 46 tahun 2013 di Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian ini, yaitu seberapa besar pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dan seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM terhadap penerapan PP NO 46 tahun 2013.

1.4.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang akan diteliti.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh dari kualitas laporan keuangan UMKM terhadap penerapan PP No 46 tahun 2013.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Umi Sekaran (2009) untuk kegunaan praktis atau *basic research* maka penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya**.** Berdasarkan pengerian diatas dapat dikatakan bahwa hasil

penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan juga berguna bagi pemerintah dalam melakukan penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang pemotongan pajak penghasilan 1% dari omzet sehingga bisa meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI;2012;1).

2.1.2 Laporan Keuangan UMKM

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut(Irham Fahmi,2011;2). Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (IAI, 2002 : par 47).

UMKM adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industry kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembagalembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya darimodal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum (Pramiyanti,2008:5).

2.1.3 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun2013

PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimasukkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Siti Resmi;2014).

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penerapan SAK ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Dalam pembuatan laporan keuangan kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha dan semua transaksi dilakukan menggunakan Kas ditangan (Delviana Sagala,2014).

SAK ETAP akan membantu UKM dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar berbasis IFRS yang akan diadopsi dalam Standar Akuntansi PSAK. (M. Jusuf Wibisana, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), /2013).

2.2.2 Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Lemahnya pengetahuan perpajakan terkait dengan transaksi bisnis UMKM menyebabkan UMKM tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara. penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan sebuah aplikasi pembukuan yang sederhana dan terintegrasi dengan pajak berbasis standar

akuntansi yang berlaku saat ini. Pentingnya akuntansi harus dipahami oleh pengusaha UMKM secara praktis tanpa harus mempelajari ilmu akuntansi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi akuntansi, para pemilik usaha dapat mengetahui bagaimana posisi serta kinerja keuangannya. Tidak hanya itu, pemilik usaha akan lebih mudah untuk menghitung pajak, karena laporan keuangan merupakan sumber data untuk menghitung pajak(Vira Maulina/2015).

2.3 Hipotesis Penelitian

H1= Penerapan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas lapotan keuangan UMKM.

H2= Kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh terhadap penerapan peraturan pemerintah tahun 2013.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Deskriptif dan Verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:31), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala seseuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudin ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka yang menjadi variabel bebas yaitu penerapan SAK ETAP (X) indikatornya Tidak mengacu pada SAK umum,menggunakan *Historical cost*,mengatur transaksi yang umum dan pengaturan lebih sederhana dari SAK Umum.

Variabel *intervening* atau penghubung (Y) pada penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan UMKM (Y) indikatornya Relevan,dapat diandalkan,Andal dan dapat dibandingkan.

Adapun variabel terikat *(dependent variable)* dalam penelitian ini yaitu Penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 (Z) indikatornya memenuhi konsep keadilan *(quality principle)* dan kemempuan membayar *(ability to pay)*.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM

3.4 Populasi, Sample, dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Popilasi

Menurut Sugiyono (2011:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan definisi diatas, populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha kecil mikro dan menengah kota bandung yang berjumlah 5440 UMKM dibawah Kementrian Koperasi dan UKM.

3.4.2 Penarikan Sample

Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2008:78) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N.e^2 + 1)}$$

Sumber: Slovin dalam Husein Umar (2008:78)
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka Penulis melakukan penelitian pada pelaku usaha UMKM kota Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan dimulai dari Febuari 2016 sampai dengan Agustus 2016. Peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode Survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan pada responden dengan cara mendatangi satu persatu responden. Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat tanggapan kuesioner yang dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden).

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010:2) valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel Penerapan SAK ETAP (X) dan Kualitas

laporan keuangan UMKM (Y), dan penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 (Z).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:3), realibilitas adalah dedrajat konsistensi/ keajegan data dalam interval waktu tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. Pengujian ini dilakukan terhadap butir pertanyaan yang termasuk dalam kategori valid.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis data Deskriptif

Penelitian dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah no 46 ttahun 2013. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

3.7.2 Analisis data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software Smart PLS* 2.0.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat

kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

3.7.3 Hipotesis

H01 ;γ1.1=0, Penerapan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan UMKM.

H11 ;γ1.1≠0, Penerapan SAK ETAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

H02 ;γ2.1=0, Kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap penerapan peraturan pemerintah tahun 2013.

H12 ;γ2.1≠0, kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh terhadap penerapan peraturan pemerintah tahun 2013.

Kriteria Pengujian :

Jika t hitung ≥ t tabel (1,645) maka H0 ditolak, berarti Ha diterima.

Jika t hitung ≤ t tabel (1,645) maka H0 diterima, berarti Ha ditolak.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Unit analisis dan Unit Observasi

Unit analisis dari penelitian ini adalah Pelaku UMKM kota Bandung, sedangkan Unit Observasinya adalah pemilik UMKM**.**

4.1.2 Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

4.1.2.1 Jumlah Responden

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada pemilik UMKM Kota Bandung sebanyak 98 responden.

4.1.2.2 Jumlah Pengembalian Responden

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada objek

penelitian, kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Persentase pengembalian kuesioner sebesar 85% dan termasuk dalam katagori Baik.

4.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah seluruh identitas responden yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi, berikut disajikan karateristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Sebagian besar responden adalah laki-laki sebanyak 76% dan sisanya adalah perempuan sebanyak 24%.

Mayoritas dari responden berusia antara <30 tahun sebanyak 37 orang (38%) dan responden yang berusia antara 31-35 tahun sebanyak 17 orang (17%) sedangkan usia responden antara 36-40 tahun sebanyak 30 orang (31%), responden yang berusia antara >40 tahun sebanyak 14 orang (14%). Usia bukan merupakan hal yang menghambat orang melakukan kegiatan salah satunya dengan membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, ini dibuktikan dengan usia responden yang beragam.

Mayoritas dari responden berpendidikan terakhir SMA sebanyak 48 orang (49%) dan paling sedikit SD sebanyak 7 orang (7%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian sampel penelitian didominasi oleh responden yang berpendidikan terakhir SMA yang menunjukkan bahwa untuk memulai usaha tidak memerlukan standar pendidikan yang tinggi, siapa yang mempunyai keinginan untuk membuka usaha bisa memulai usaha mereka tanpa terkendala dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

4.1.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas

4.1.4.1 Hasil Uji Validitas

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengujian validitas instrumen, terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan untuk masing-masing variabel yang terdiri dari Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik, Kualitas Laporan Keuangan dan Penerapan PP no 46 tahun 2013 memiliki nilai koefisien validitas di atas 0,3 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut sudah mampu mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti melalui sebuah alat test (kuesioner). Dengan demikian kuesioner uji validitas dalam penelitian ini dapat menggambarkan variabel Standar Akuntansi Keungan

Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (X) dan Kualitas Laporan Keuangan dan Penerapan PP no 46 tahun 2013(Y)

4.1.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terlihat bahwa ketiga variabel yang diuji yakni kompetensi Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik, Kualitas Laporan Keuangan dan Penerapan PP no 46 tahun 2013 memiliki nilai koefisien reliabilitas di atas titik kritis 0,7 yang menunjukan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Dengan kata lain alat ukur yang digunakan sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.5.1 Tanggapan Responden Mengenai SAK ETAP

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang di ukur menggunakan lima item pernyataan, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentse skor tertinggi sebesar 75,7% terdapat pada pernyataan nomor 4 yang mewakili indikator pengaturan lebih sederhana termasuk dalam kategori baik, sedangkan persentase terendah sebesar 58,8% terdapat pada pernyataan nomor 2 yang mewakili indikator menggunakan *Historical Cost Concepts* termasuk dalam kategori cukup. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 66,6% termasuk dalam kategori “Cukup” hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tergolong dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan kuesioner diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dilihat dari hasil kuesioner pertanyaan no 1 yang mewakili indikator tidak mengacu pada SAK umum, tetapi masih banyak sebagian dari pelaku UMKM malah terkadang masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan umum, hal ini mungkin saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga dari IAI.

4.1.5.2 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel Kualitas Laporan Keuangan UMKM yang di ukur menggunakan empat item pernyataan, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentse skor tertinggi sebesar 70,6% terdapat pada pernyataan nomor 1 dan 2 yang mewakili indikator relevan dan andal termasuk dalam kategori baik, sedangkan persentase terendah sebesar 56,9% terdapat pada pernyataan nomor 4 yang mewakili indikator dapat dibandingkan termasuk dalam kategori cukup. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 64,5% termasuk dalam kategori "cukup" hal ini menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan UMKM tergolong dalam kategori cukup. Berdasarkan penjelasan diatas bisa menjawab fenomena bahwa memang masih ada pelaku UMKM yang membuat laporan keuangan tidak berrdasarkan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, bisa dilihat dari pertanyaan kuesioner no 4 sebesar 31,6% yaitu Kemempuan informasi Laporan keuangan kurang bisa dibandingkan, seharusnya jika sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik maka Laporan Keuangan UMKM tersebut bisa dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenerungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relative.

4.1.5.3 Tanggapan Responden Mengenai PP N o 46/2013

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang di ukur menggunakan dua item pernyataan, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentse skor tertinggi sebesar 54,9% terdapat pada pernyataan nomor 1 yang mewakili indikator konsep keadilan *(equality priciple)* termasuk dalam kategori baik, sedangkan persentase terendah sebesar 53,1% terdapat pada pernyataan nomor 2 yang mewakili indikator kemampuan membayar termasuk dalam kategori cukup. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 54,0% termasuk dalam kategori "Cukup" hal ini menunjukan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tergolong dalam kategori cukup.

4.1.6 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis konseptual berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan

adalah adanya pengaruh Penerapan Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM dan implikasinya terhadap penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini terdapat 3 varibel laten dan 10 variabel manifes yakni Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (X) yang diukur dengan 4 variabel manifes, kualitas laporan keuangan UMKM (Y) dengan 4 variabel manifes dan penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 (Z) dengan 2 variabel manifes.

4.1.6.1 Outer Model

Model pengukuran digunakan untuk melihat hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latennya. Untuk mengevaluasi *outer model*, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas.

4.1.6.2 Evaluasi Model

Pengujian *inner model* (model struktural) berfungssi untuk melihat hubungan struktural dan pengaruh antara variabel laten yang terbentuk. *Inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* untuk setiap variabel *endogen* sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten *eksogen* tertentu terhadap variabel laten *endogen*.

4.1.6.2.1 Koefisiensi Korelasi

1. Nilai korelasi yang diperoleh antara Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public dengan Kualitas Laporan keuangan UMKM adalah sebesar 0,615 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat ada pada interval korelasi antara 0,40 - 0,699. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik penerapan Standar Akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, maka Kualitas Laporan keuangan UMKM akan semakin optimal. Sedangkan nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 6,385

lebih besar dari nilai t_{tabel} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

2. Nilai korelasi yang diperoleh antara Kualitas laporan UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 adalah sebesar 0,692 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat berada pada interval korelasi antara 0,40 - 0,699. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kualitas laporan UMKM maka semakin baik pula penerapan peraturan pemerirntah no 46 tahun 2013. Sedangkan nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 11,066 lebih besar dari nilai t_{tabel} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645 menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

4.1.6.2.2 Koefisiensi Determinasi

R *Square* yang diperoleh variabel Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (X) memberikan pengaruh kepada variabel Kualitas Laporan keuangan (Y) sebesar 37,8%, sedangkan variabel Kualitas Laporan keuangan (Y) memberikan pengaruh kepada variabel Penerapan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 (Z) sebesar 47,8%. Total Pengaruh (R *Square*) sebesar 85,6%, sedangkan sisanya sebesar 14,4% merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kualitas Laporan keuangan (Y) lebih besar korelasinya terhadap Penerapan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 (Z) dibandingkan korelasi Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (X) terhadap Penerapan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 (Z) .

4.1.6.2.3 Hipotesis

Digunakan nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan pada gambar 4.7, $t_{statistik}$ untuk variabel X terhadap Y diperoleh sebesar 6,385. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,8%.

Digunakan nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan pada tabel 4.7, $t_{statistik}$ untuk variabel Y terhadap Z diperoleh sebesar 11,066. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Kualitas Laporan Keuangan UMKM terbukti berpengaruh terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan kontribusi pengaruh sebesar 69,2%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Implikasinya Terhadap Penerapan PP No 46 tahun 2013

Dalam pengujian hipotesis dapat di lihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 11,066 Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indakoefesiehyanti,2013), sehingga disimpulkan H_a diterima, Artinya Kualitas Laporan Keuangan UMKM berpengaruh Terhadap Penerapan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan pengaruh 47,8 % sedangkan selisihnya sebesar 52,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti kualitas Sumber Daya Manusia, Sosialisasi. Menunjukkan bahwa ketika Kualitas Laporan Keuangan UMKM semakin tinggi maka Penerapan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 semakin meningkat.

Dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan bahwa Penerapan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 mempunyai tanggapan 54,0% dan termasuk kategori Cukup, dimana persentase tertinggi diperoleh indikator Konsep Keadilan sebesar 54,09%, sedangkan persentase terendah 53,01% mewakili indikator kemampuan membayar. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dan skor ideal yang telah dicapai, diperoleh nilai persentase sebesar 54,0% nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 52,01% - 68 % dan berada dalam kategori cukup, namun masih terdapat *gap* sebesar 46 % (100% - 54%) yang menunjukkan masih terdapat masalah terkait Penerapan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

4.2.2 Penerapan SAK ETAP yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM terdapat korelasi sebesar 0,615 artinya relasi cukup dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

meningkat maka Kualitas Laporan Keuangan UMKM akan semakin baik. Kemudian terdapat pengaruh antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 37,8% sedangkan selisihnya sebesar 62,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti kurang pahamnya wajib pajak terhadap peraturan pemerintah no 46 tahun 2013.

Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Kualitas Laporan keuangan UMKM mempunyai tanggapan responden sebesar 64,5% dan termasuk kategori cukup persentse skor tertinggi sebesar 70,6% terdapat pada pernyataan nomor 1 dan 2 yang mewakili indikator relevan dan andal termasuk dalam kategori baik, sedangkan persentase terendah sebesar 56,9% terdapat pada pernyataan nomor 4 yang mewakili indikator dapat dibandingkan termasuk dalam kategori cukup, namun masih terdapat *gap* sebesar 35,5% (100% - 64,5%) yang menunjukan masih terdapat masalah terkait Kualitas Laporan Keuangan UMKM. Selain itu, dalam pengujian hipotesis bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,385 lebih besar dari t_{tabel} 1,645 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Implikasinya terhadap Penerapan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2016, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dipengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM, masalah yang terjadi pada Laporan Keuangan UMKM yang belum berkualitas terjadi karena:
   a) Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM jarang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Umum;
   b) Tingkat Pemahaman pengguna laporan keuangan rendah;.
   c) Kemampuan informasi Laporan Keuangan dengan kebuutuhan perbandingan dengan industrilain yang sejenis kurang bisa diandalkan.

2) Kualitas Laporan Keuangan UMKM berpengaruh pada penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, permasalahan pada penerapan PP no 46 tahun 2013 yang belum optimal terjadi karena:
   a) informasi yang disajika dalam laporan keuangan andal;
   b) PP no 46 tahun 2016 kurang mencerminkan kemampuan membayar
   c) Pemotongan Pajak 1% daro Omzet Kurang memenuhi Asas keadilan

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Implikasinya terhadap Penerapan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2016, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Kualitas laporan keuangan UMKM maka masih di perlukannya sosialisasi pemerintah dan juga Ikatan Akuntansi Indonesia untuk memberikan bimbingan serta pendampingan untuk para pelaku UMKM dalam membuat Laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, serta bisa membuat usaha yang sedang dijalani bisa semakin berkembang.
2) Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak terhadap pemotongan pajak penghasilan 1% dari omzet maka pihak direktorat jendral pajak harus lebih memperhatikan kesejahteraan para wajib pajak dengan memperhatikan asas keadilan yaitu pemotongan PPh final 1% lebih meringankan para pelaku UMKM jika perhitungan berdasarkan penghasilan netto, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak masih keberatan dengan adanya PP no 46 tahun 2013.

5.2.2 Saran Akademik

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi indikator, unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Delviana Segala. 2014. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP: Study Kasus oada Home Industry otak otak bandeng Mulya Surya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro.

Erik Dwi Pambudi. 2012*. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi kasus pada Usaha Sari Apel Kota Baru*.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Per 1 Oktober, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009.*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa AkuntabilitasPublik*. Jakarta: Salemba Empat.

Imam Ghozali, 2006, *Structural Equation Modelling Methode Alternatif dengan Partial Least Square* , Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irham Fahmi,. 2011. *Analisis Laporan Keuangan.* Lampulo: ALFABETA

Pramiyanti, Alila. 2008. *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*. Jakarta: Gramedia

Ruston Tambunan. 2013. *Dampak dari Kebijakan "Satu Persen" Pajak pada UMKM*. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. (Vol. 8 – Oktober 2013). Hlm.1-2

Siti Resmi 2014. *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Salemba Empat

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet

Umi sekaran. 2006.*Metodologi PenelitianBisnis*. Jakarta: Salemba.

Vira Maulina. 2015. *Perancangan laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis SAK Etap dan PP no 46 Tahun 2013 Menggunakan Microsoft Excel.* Politeknik Negeri Padang

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1.	SAK ETAP (X)	sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose) bagi pengguna eksternal. **(IAI,2009:1)**	1.Tidak mengacu ke SAK Umum 2.Menggunakan *Historical cost Concepts* 3.Mengatur transaksi yang umum 4. Pengaturan lebih sederhana **(Ikatan Akuntansi Indonesia,2009)**	Ordinal
2.	Kualitas Laporan Keuangan UMKM (Y)	Merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. **(Irham Fahmi,2011;2)**	a. Relevan b. Andal c. Dapat dipahami d. Dapat dibandingkan **(PSAK No 1 (2007:7)**	Ordinal
3.	Penerapan peraturan pemerintah no	Penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tetang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu	a. Konsep keadilan *(equality principle)* b. Kemampuan membayar (*ability to pay)*	Ordinal

	46 tahun 2013 (Z)	atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau samadengan Rp4,8 miliar pertahun	**(RustonTambunan,2013)**	

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik	1	0,756	0,300	Valid
	2	0,749	0,300	Valid
	3	0,763	0,300	Valid
	4	0,745	0,300	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	5	0,796	0,300	Valid
	6	0,830	0,300	Valid
	7	0,872	0,300	Valid
	8	0,852	0,300	Valid
Penerapan PP no 46 tahun 2013	9	0,964	0,300	Valid
	10	0,957	0,300	Valid

Sumber: Data kuesioner diolah, 2016

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas public	0,741	0,700	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,857	0,700	Reliabel
Penerapan PP no 46 tahun 2013	0,914	0,700	Reliabel

Sumber: Data kuesioner diolah, 2016

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

No	Pernyataan		Bobot					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Pencatatan keuangan yang dilakukan Bapak/Ibu selama ini	F	3	31	35	19	10	98	292	490	59,6%	Cukup
		%	3,06	31,6	35,7	19,4	10,2	100				
2	Konsep pencatatan keuangan yang digunakan Bapak/Ibu	F	5	27	36	17	13	98	288	490	58,8%	Cukup
		%	5,1	27,6	36,7	17,3	13,3	100				
3	Pencatatan keuangan Bapak/Ibu selama ini mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil mikro kecil dan menengah	F	11	51	27	6	3	98	355	490	72,4%	Baik
		%	11,2	52	27,6	6,12	3,06	100				
4	Tingkat kesederhanaan pencatatan keuangan Bapak/Ibu selam ini	F	22	40	31	3	2	98	371	490	75,7%	Baik
		%	22,4	40,8	31,6	3,06	2,04	100				
Total									**1306**	**1960**	**66,6%**	**Cukup**

Sumber : Hasil Olah Data, 2016

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan UMKM

No	Pernyataan		Bobot Tanggapan					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Informasi yang dihasilkan Laporan Keuangan dikaitkan dengan kebutuhan Bapak/Ibu	F	3	57	30	5	3	98	346	490	70,6%	Baik
		%	3,06	58,2	30,6	5,1	3,06	100				
2	Tingkat kepercayaan informasi yang dihasilkan Laporan Keuangan Bapak/Ibu	F	4	52	35	6	1	98	346	490	70,6%	Baik
		%	4,08	53,1	35,7	6,12	1,02	100				
3	Tingkat pemahaman pengguna informasi atas laporan keuangan Bapak/Ibu	F	4	18	51	23	2	98	293	490	59,8%	Cukup
		%	4,08	18,4	52	23,5	2,04	100				
4	Tingkat kemampuan informasi Laporan Keuangan Bapak/Ibu dengan kebutuhan perbandingan dengan industri lain	F	4	14	46	31	3	98	279	490	56,9%	Cukup
		%	4,08	14,3	46,9	31,6	3,06	100				
Total									**1264**	**1960**	**64,5%**	**Cukup**

Sumber : Hasil Olah Data, 2016

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

No	Pernyataan		Bobot Tanggapan					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Konsep keadilan	F	5	14	40	29	10	98	269	490	54,9%	Cukup
		%	5,1	14,3	40,8	29,6	10,2	100				
2	Kemampuan Membayar	F	4	11	37	39	7	98	260	490	53,1%	Cukup
		%	4,08	11,2	37,8	39,8	7,14	100				
Total									**529**	**980**	**54,0%**	**Cukup**

Sumber : Hasil Olah Data, 2016

Tabel 4.25
Koefisien Korelasi

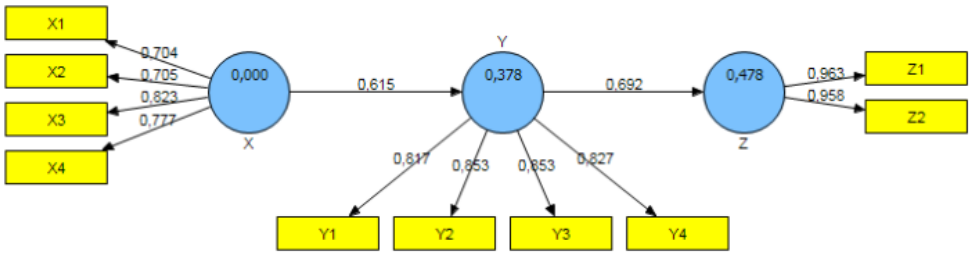
Latent Variabel	Correlations	T Statistics
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (X) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,615	6,385
Kualitas Laporan Keuangan (Y) -> Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 (Z)	0,692	11,066

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Tabel 4.26
Koefisien Determinasi

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi	Pengaruh (%)
X -> Y	0,615	0,615	37,8%
Y -> Z	0,692	0,692	47,8%
Total Pengaruh (R2)			85,6 %

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS



Gambar 4.8 Nilai *Path Coefficient*